

**STRATEGI POLITIK TEUKU UMAR
DALAM
MEMIMPIN PERLAWANAN ACEH
TERHADAP
KOLONIALISME BELANDA (1893–1899)**

**Viola Junita Fridiza¹, Ira Miyarni
Sustianingsih², Sarkowi³
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas
Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas PGRI Silampari¹
Email: violajunitafridiza@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi politik Teuku Umar dalam memimpin perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda pada periode 1893–1899. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi kepustakaan. Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer berupa laporan kolonial, arsip, dokumen, dan sumber sekunder berupa buku serta artikel ilmiah mengenai Perang Aceh dan Teuku Umar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik Teuku Umar berkembang secara adaptif mengikuti perubahan hubungan kekuasaan. Pada 1893–1896, hubungan dengan pemerintah kolonial menempatkan Teuku Umar dalam ruang politik dan struktur militer yang memberinya akses terhadap sumber daya tertentu. Pada 1896, perubahan posisi politik ditandai dengan keluarnya Teuku Umar dari pihak Belanda dan kembalinya ia ke dalam perlawanan Aceh. Setelah itu, strategi perjuangan berkembang melalui konsolidasi kekuatan, hubungan dengan pemimpin lokal, mobilisasi dukungan masyarakat, serta adaptasi terhadap operasi militer dan kebijakan politik Belanda

sampai 1899. Strategi tersebut berkontribusi terhadap penguatan organisasi, sumber daya, dan keberlangsungan jaringan perlawanan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab bertahannya Perang Aceh atau sebagai keberhasilan mutlak mengalahkan Belanda.

Kata Kunci: Strategi Politik, Teuku Umar, Perang Aceh, Kolonialisme Belanda, Perlawanan Aceh.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan kedaulatan dari kekuasaan kolonial. Konflik antara Aceh dan Belanda berkembang menjadi peperangan berkepanjangan sejak 1873. Perlawanan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk pertempuran terbuka, tetapi juga berkembang melalui perang gerilya, mobilisasi masyarakat, penguatan semangat keagamaan, serta berbagai strategi politik yang diterapkan oleh para pemimpin Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Perang Aceh merupakan konflik yang kompleks karena kekuatan militer, kepemimpinan, agama, struktur sosial, dan kepentingan politik saling berhubungan dalam menentukan dinamika perlawanan (Kurnia, Saputro, & Prakoso, 2023).

Perlawanan masyarakat Aceh juga tidak dapat dilepaskan dari usaha mempertahankan kedaulatan politik dan identitas masyarakat. Semangat keagamaan yang berkembang melalui gagasan prang sabi menjadi salah satu unsur yang memperkuat perjuangan. Fadhlhi, Ichwan, dan Machasin (2024) menunjukkan bahwa Hikayat Prang Sabi mempertemukan nilai agama dengan kebudayaan Aceh sehingga membentuk pemaknaan tentang perjuangan melawan kolonialisme. Di sisi lain, pemerintah kolonial

Belanda terus melakukan perubahan strategi. Saputra dan Mizna (2022) menjelaskan bahwa Snouck Hurgronje memberikan perhatian terhadap ulama dan uleebalang karena keduanya memiliki pengaruh penting dalam masyarakat Aceh.

Dalam dinamika tersebut, Teuku Umar muncul sebagai salah satu tokoh penting. Perannya menarik dikaji karena tindakan politiknya tidak berlangsung secara linear. Pada 30 September 1893 Teuku Umar kembali berpihak kepada Belanda. Hubungan tersebut memberinya ruang untuk berada dalam struktur militer kolonial dan memperoleh akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit diperoleh oleh pihak perlawanan. Pada Maret 1896, hubungan tersebut berubah ketika Teuku Umar meninggalkan dinas Belanda bersama pasukan dan sejumlah persenjataan yang kemudian memperkuat kembali perlawanan Aceh. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa posisi Teuku Umar perlu dianalisis bukan hanya dari perspektif peperangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik dalam menghadapi kekuasaan kolonial.

Penelitian terdahulu telah membahas Perang Aceh, strategi perang masyarakat Aceh dan Belanda, kepemimpinan dan peranan Teuku Umar, strategi Belanda di Aceh Barat, kebijakan Snouck Hurgronje, serta jaringan perlawanan tokoh Aceh. Kurnia et al. (2023) mengkaji strategi perang Aceh dan Belanda 1873–1912; Putra dan Ma'rif (2022) mengkaji kepemimpinan Teuku Umar; Burhanuddin (2024) membahas peranan Teuku Umar 1873–1899; Amijz (2024) memusatkan perhatian pada strategi Belanda di Aceh Barat; Saputra dan Mizna (2022) mengkaji peran Snouck Hurgronje; sedangkan Rachmatullah dan Shabura (2022) membahas Teuku Nyak Makam dan konsolidasi kekuatan di pantai timur Aceh. Penelitian ini berbeda karena memusatkan analisis

pada strategi politik Teuku Umar selama 1893–1899.

Berdasarkan fokus tersebut, strategi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan Teuku Umar yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan kekuasaan untuk memperkuat posisi perlawanan Aceh. Fokus meliputi hubungan strategis dengan pemerintah Belanda, pemanfaatan kepercayaan dan sumber daya kolonial, perubahan posisi politik pada 1896, konsolidasi kekuatan, mobilisasi dukungan masyarakat, serta respons dan adaptasi terhadap kebijakan politik dan militer Belanda sampai 1899. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi politik Teuku Umar dalam memimpin perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda pada periode 1893–1899.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi kepustakaan. Batas temporal penelitian adalah 1893–1899. Tahun 1893 dipilih karena pada periode tersebut Teuku Umar mulai menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda dan memperoleh kedudukan dalam struktur militer kolonial. Tahun 1896 merupakan titik perubahan ketika Teuku Umar meninggalkan pihak Belanda dan kembali bergabung dalam perjuangan Aceh, sedangkan 1899 menjadi batas akhir penelitian karena merupakan periode akhir perjuangan Teuku Umar sebelum wafatnya. Secara spasial, penelitian berfokus pada wilayah Aceh, khususnya Aceh Barat.

Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Koloniaal Verslag van Nederlandsch-Indië tahun 1893, 1896, 1897, dan 1898 yang diterbitkan Ministerie van Koloniën, arsip Arsip Nasional Republik

Indonesia, dokumen mengenai kebijakan kolonial, serta dokumen nasihat C. Snouck Hurgronje. Sumber sekunder meliputi buku sejarah dan artikel jurnal yang membahas Perang Aceh, strategi perjuangan Teuku Umar, dan kondisi politik Aceh pada akhir abad ke-19.

Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber, meliputi kritik eksternal untuk menguji keaslian sumber dan kritik internal untuk menguji kredibilitas isi melalui perbandingan berbagai sumber. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji untuk menjelaskan strategi politik Teuku Umar. Keempat, historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian secara kronologis dan analitis dengan memperhatikan hubungan sebab-akibat. Prosedur ini mengikuti kerangka metode sejarah yang digunakan dalam skripsi dengan merujuk pada Sjamsuddin (2012), Gottschalk (1986), dan Kuntowijoyo (2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Politik Aceh dan Perang Aceh Menjelang 1893

Pada akhir abad ke-19, Aceh menjadi salah satu wilayah di Nusantara yang mengalami konflik panjang dengan pemerintah kolonial Belanda. Perang Aceh yang dimulai sejak 1873 tidak hanya berlangsung sebagai konflik militer, tetapi juga menjadi pertarungan politik antara usaha kolonial Belanda memperluas kekuasaan dengan upaya masyarakat Aceh mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Struktur kekuasaan Aceh melibatkan sultan, uleebalang, ulama, panglima perang, dan masyarakat sehingga perlawanan tidak berjalan melalui satu pusat komando.

Belanda menyadari bahwa penguasaan Aceh tidak cukup dilakukan melalui kekuatan militer. Karena itu, pemerintah kolonial menggunakan pendekatan politik dengan memahami struktur sosial dan membangun hubungan dengan kelompok tertentu. Memasuki 1890-an, kekuatan militer saja belum mampu sepenuhnya mengakhiri perlawanan Aceh. Perlawanan berkembang melalui perang gerilya, mobilisasi penduduk, dukungan tokoh agama, dan jaringan pemimpin lokal. Aceh Barat memiliki kedudukan penting secara politik dan ekonomi dan menjadi salah satu wilayah penting dalam aktivitas Teuku Umar.

2. Strategi Politik Teuku Umar Tahun 1893–1896

Pada 30 September 1893 Teuku Umar kembali bergabung dengan pihak Belanda. Keputusan tersebut mengubah posisinya dari pemimpin perlawanan menjadi tokoh yang memiliki hubungan dengan struktur pemerintahan dan militer kolonial. Melalui hubungan tersebut, Teuku Umar memperoleh kedudukan dalam struktur militer kolonial serta akses terhadap berbagai sumber daya yang sebelumnya berada di bawah kendali Belanda (Ministerie van Koloniën, 1894; Kruisheer, 1913).

Hubungan tersebut memberikan ruang bagi Teuku Umar untuk memahami sistem organisasi militer Belanda, memperoleh informasi mengenai kekuatan kolonial, dan mendapatkan akses terhadap pasukan, perlengkapan, serta sumber daya tertentu. Namun, skripsi menegaskan bahwa motif pribadi Teuku Umar tidak dapat dipastikan secara mutlak hanya dari satu sumber. Oleh karena itu, hubungan tersebut dipahami sebagai proses politik yang memiliki konsekuensi strategis, bukan langsung disimpulkan sebagai penyamaran atau kerja sama biasa.

Kepercayaan yang muncul dari pihak Belanda menjadi unsur penting. Kedudukan tersebut memberikan peluang untuk memahami kekuatan lawan sekaligus memperluas kemampuan organisasi. Nilai strategis hubungan tidak hanya terletak pada materi, tetapi juga pada pengetahuan mengenai cara kerja kekuatan kolonial. Dengan demikian, periode 1893–1896 memperlihatkan kemampuan Teuku Umar mengelola hubungan kekuasaan sebagai bagian dari perjuangan.

3. Perubahan Strategi Politik Teuku Umar Tahun 1896

Hubungan Teuku Umar dengan pemerintah kolonial tidak berlangsung permanen. Pada 1896 Teuku Umar meninggalkan pihak Belanda dan kembali bergabung dengan kekuatan perlawanan Aceh. Perubahan ini menjadi titik penting karena mengubah kembali kedudukannya dalam konflik. Pemerintah kolonial yang sebelumnya memberikan kepercayaan dan kedudukan kemudian menghadapi seorang pemimpin perlawanan yang telah memiliki pengalaman mengenai struktur dan kekuatan kolonial (Ministerie van Koloniën, 1897; Gobée & Adriaanse, 1957).

Salah satu dampak penting perubahan posisi tersebut adalah berpindahnya sejumlah pasukan dan perlengkapan militer yang sebelumnya diperoleh selama berada dalam struktur kolonial. Peristiwa tersebut meningkatkan kemampuan organisasi perlawanan dan menunjukkan keterkaitan antara strategi politik dan strategi militer. Namun, penelitian tidak menilai peristiwa tersebut sebagai keberhasilan mutlak, melainkan sebagai kontribusi strategis terhadap perubahan posisi dan kemampuan perjuangan Aceh.

Kembalinya Teuku Umar juga memperlihatkan bahwa hubungan politik dengan Belanda menghasilkan pengalaman dan pengetahuan yang

kemudian memengaruhi langkah perjuangan. Perubahan posisi pada 1896 dapat dipahami sebagai keputusan politik yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, sumber daya, dan keberlanjutan perlawanan.

4. Konsolidasi Kekuatan dan Mobilisasi Perlawanan 1896–1899

Setelah kembali bergabung dengan pihak perlawanan Aceh, Teuku Umar menghadapi kebutuhan membangun kekuatan yang mampu bertahan menghadapi Belanda. Konsolidasi tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan pasukan bersenjata, tetapi juga pengaturan hubungan antara pemimpin, pengikut, dan kelompok masyarakat yang mendukung perjuangan. Kekuatan perlawanan Aceh terbentuk melalui jaringan berbagai kelompok sehingga kemampuan menjaga koordinasi dan loyalitas menjadi penting.

Teuku Umar membangun hubungan dengan tokoh-tokoh lokal yang memiliki kekuatan sosial dan politik. Hubungan tersebut tidak hanya bertujuan memperbesar jumlah pendukung, tetapi juga menciptakan koordinasi dalam menghadapi tekanan militer dan politik kolonial. Temuan ini memiliki konteks yang sejalan dengan kajian Rachmatullah dan Shabura (2022) mengenai pentingnya konsolidasi dari berbagai unsur kepemimpinan dalam perlawanan Aceh.

Mobilisasi masyarakat menjadi bagian penting dari keberlangsungan perjuangan. Dukungan masyarakat tidak hanya berupa keterlibatan langsung dalam pertempuran, tetapi juga penyediaan informasi, perlindungan, logistik, dan dukungan moral. Dengan demikian, strategi politik Teuku Umar dapat dilihat melalui kemampuannya menghubungkan kepemimpinan pribadi dengan dukungan kolektif masyarakat Aceh.

5. Adaptasi Strategi Teuku Umar terhadap Kebijakan Belanda 1896–1899

Setelah Teuku Umar kembali ke pihak perlawanan pada 1896, pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan pengaruhnya di Aceh Barat. Teuku Umar merespons tekanan tersebut tidak hanya melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui pengaturan strategi politik untuk mempertahankan jaringan perjuangan. Karena kekuatan kolonial lebih unggul dalam organisasi dan persenjataan, pendekatan tidak selalu berupa konfrontasi langsung.

Strategi gerilya dipahami dalam penelitian sebagai bagian dari keputusan politik untuk mempertahankan keberadaan perlawanan. Penggunaan gerilya mendukung mobilitas pasukan, pemeliharaan jaringan pendukung, dan penghindaran tekanan langsung dari kekuatan Belanda. Di sisi lain, Belanda juga menerapkan strategi politik dengan mendekati kelompok masyarakat dan pemimpin lokal. Karena itu, Teuku Umar perlu menjaga kepercayaan dan loyalitas internal agar jaringan perlawanan tidak melemah. Pada 1896–1899, perubahan taktik Teuku Umar menunjukkan bahwa strategi tidak bersifat tetap. Ia menggunakan pengalaman selama berhubungan dengan pemerintah kolonial untuk membaca pola kekuasaan dan menyesuaikan langkah dengan keadaan. Menjelang 1899, Teuku Umar tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam dinamika perlawanan Aceh hingga gugur di Meulaboh. Tahun 1899 digunakan sebagai batas penelitian dan tidak digunakan untuk menyatakan keberhasilan total perang.

6. Analisis Strategi Politik Teuku Umar dalam Perspektif Sejarah

Rangkaian peristiwa 1893–1899 menunjukkan bahwa strategi politik Teuku Umar bersifat adaptif. Pada 1893, hubungan dengan pemerintah kolonial membuka akses terhadap struktur kekuasaan dan sumber daya. Pada 1896, perubahan posisi menunjukkan kemampuan mengubah langkah politik ketika hubungan tersebut berakhir. Setelah kembali ke pihak Aceh, strategi berkembang melalui konsolidasi, hubungan dengan pemimpin lokal, mobilisasi masyarakat, dan penyesuaian terhadap tekanan kolonial.

Strategi politik tersebut tidak dapat dipisahkan dari strategi militer, tetapi strategi militer ditempatkan sebagai konsekuensi atau bagian dari keputusan politik. Pengelolaan sumber daya, hubungan sosial, jaringan pendukung, dan pilihan tindakan menjadi unsur yang mendukung keberlangsungan perlawanan. Kepemimpinan Teuku Umar terlihat melalui kemampuan membaca situasi, membangun hubungan, mengelola perubahan posisi, melakukan konsolidasi, dan mempertahankan dukungan masyarakat.

Dampak strategi dibatasi pada perubahan yang dapat ditelusuri dari sumber sejarah, yaitu perubahan akses terhadap sumber daya, perubahan posisi politik, konsolidasi kekuatan, dan kemampuan mempertahankan jaringan perlawanan. Berdasarkan indikator tersebut, strategi Teuku Umar memberikan kontribusi terhadap penguatan kemampuan perlawanan Aceh, khususnya dalam organisasi, sumber daya, dan keberlangsungan perjuangan. Namun, pengaruh tersebut tidak dapat dinyatakan secara absolut karena perlawanan melibatkan banyak tokoh dan kelompok serta berlangsung dalam kondisi ketimpangan kekuatan yang besar.

Berdasarkan keseluruhan analisis, strategi politik Teuku Umar pada periode 1893–1899 dapat dimaknai sebagai bentuk perjuangan adaptif yang

menggabungkan kemampuan politik, sosial, dan militer. Kekuatan perlawanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bertempur, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola hubungan kekuasaan, membangun jaringan, memanfaatkan peluang, dan mempertahankan dukungan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, strategi politik Teuku Umar dalam memimpin perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda pada 1893–1899 tidak hanya berkaitan dengan tindakan militer, tetapi juga dengan pengelolaan hubungan politik, perubahan posisi, akses terhadap sumber daya, konsolidasi kekuatan, dan mobilisasi dukungan. Pada 1893–1896, hubungan dengan pemerintah kolonial menempatkan Teuku Umar dalam ruang politik dan struktur militer yang memberinya akses terhadap sumber daya tertentu. Fakta tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan konsekuensi strategis hubungan tersebut, tetapi motif pribadi Teuku Umar tidak dapat dipastikan secara mutlak hanya dari satu sumber.

Perubahan posisi pada 1896 menjadi titik penting dalam perkembangan strategi politik. Kembalinya Teuku Umar ke dalam perlawanan Aceh disertai pemanfaatan pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya yang diperoleh selama berada dalam hubungan dengan pemerintah kolonial. Setelah itu, strategi konsolidasi, hubungan dengan pemimpin lokal, mobilisasi dukungan, serta adaptasi terhadap operasi militer dan kebijakan politik Belanda menjadi bagian dari upaya mempertahankan jaringan perlawanan.

Dengan demikian, strategi politik Teuku Umar pada periode 1893–1899 bersifat adaptif dan berkembang mengikuti perubahan hubungan kekuasaan. Strategi tersebut mencakup hubungan

politik dengan pemerintah kolonial, pemanfaatan ruang dan sumber daya yang tersedia, perubahan posisi pada 1896, konsolidasi kekuatan, mobilisasi dukungan, serta adaptasi terhadap tekanan kolonial. Strategi tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan organisasi, sumber daya, dan keberlangsungan jaringan perlawanan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab bertahannya Perang Aceh atau sebagai keberhasilan mutlak mengalahkan Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, I. (1987). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Amijz, R. (2024). Dutch strategy in West Aceh (Aceh War, 1873–1906): Strategi Belanda di Aceh Barat (Perang Aceh, 1873–1906). *Samudra: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, 8(1), 267–273.
- Burhanuddin. (2024). Peranan Teuku Umar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tahun 1873–1899. *Journal of Teacher Education*, 5(3), 236–243.
- Fadhli, F., Ichwan, M. N., & Machain, M. (2024). Tafsir Hikayati as a resistance hermeneutics: Hikayat Prang Sabi's contribution to holy war literature and Qur'anic studies. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 19–64.
- Gobbée, E., & Adriaanse, C. (Eds.). (1957). *Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889–1936 (Vol. 1)*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Krausser, A. (1913). Atjeh '96 (Vol. 1). Visser & Co.
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). War strategy of Acehnese and Dutch in the Aceh War 1873–1912. JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 7(1), 18.
- Ministerie van Koloniën. (1894). Koloniaal verslag van Nederlandsch-Indië over 1893. Den Haag: Ministerie van Koloniën.
- Ministerie van Koloniën. (1897). Koloniaal verslag van Nederlandsch-Indië over 1896. Den Haag: Ministerie van Koloniën.
- Ministerie van Koloniën. (1898). Koloniaal verslag van Nederlandsch-Indië over 1897. Den Haag: Ministerie van Koloniën.
- Ministerie van Koloniën. (1899). Koloniaal verslag van Nederlandsch-Indië over 1898. Den Haag: Ministerie van Koloniën.
- Putra, Z., & Ma'rif, J. (2022). Teuku Umar leadership as reflection of Islamic leadership. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 1–14.
- Rachmatullah, R., & Shabura, T. (2022). Teuku Nyak Makam and his role in the Dutch colonial war on the east coast of Aceh (1865–1896). JUPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 14(1), 60–67.
- Reid, A. (2005). Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saputra, S., & Mizna, A. (2022). The roles of Snouck Hurgronje in reducing the Acehnese resistance against the Dutch. Jurnal Adabi, 24(2), 237.
- Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.